BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, Jadi tanah (dalam hal ini adalah tanah pertanian) mempunyai peranan pokok dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi pemilik tanah, sehingga sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh mereka seperti menanam kelapa, pinang, serta sayur-sayuran, dan dalam melakukan kegiatan tersebut tidak keseluruhan dari anggota masyarakat di pedesaan ini memiliki lahan untuk bercocok tanam, akan tetapi juga terdapat diantara anggota masyarakat di desa tersebut tidak memiliki lahan sama sekali (tuna kisma) dan ada juga yang memiliki lahan atau tanah secara berlebihan yang tidak di manfaatkan atau diolah dengan baik oleh pemiliknya sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai cara yang ditempuh oleh sebahagian anggota masyarakat untuk bercocok tanam di pedesaan ini seperti mengadakan perjanjian sewa menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya.

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri, perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin

mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹

Dalam hal bagi hasil tanah pertanian, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Dalam mengadakan hubungan hukum yang berupa bagi hasil tanah pertanian hal tersebut terkandung asas umum hukum adat adalah pihak penggarap tanah harus menyerahkan hasilnya kepada yang mempunyai tanah. Pemilik tanah memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dari tanah dengan mengizinkan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan ketentuan hasil tanah pertanian itu akan dibagi dengan kesepakatan bersama.

Peraturan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tersebut di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana di kehendaki, misalnya tentang tentang beri memberi tanah dan penggarap adalah soal biasa sebagai tanda persaudaraan, penghargaan atau terimakasih sebelum atau yang mendahului suatu perjanjian.

Didaerah bekas transmigrasi lama yaitu di pringsewu (gendongtataan) Kabupaten Lampung Selatan, banyak berlaku perjanjian bagi hasil sawah yang tidak dibuat secara tertulis dan tidak pula diketahui para pamong desa. Sedangkan masalah lama waktu berlakunya perjanjian bagi hasil tergantung kepada pemilik sawah, apakah ia akan meneruskan perjanjian bagi hasil dengan penggarap atukah tidak. Segala sesuatunya berjalan atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong,²

¹ Urip Santoso, *Hak Atas Tanah, Ha katas Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*, Depok, PT.Kharisma Putra Utama, 2017, cet. I, hal 156

² Hilman HadiKusuma, *Hukum Perjanjian Adat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, Cet.V, hal.143-144*

Bentuk perjanjian ini dapat dikatakan belaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat setempat seperti “maro” (Jawa), “nengah” (Periangan), “tesang” (Sulawesi Selatan), “toyo” (Minahasa), “perdua” (Sumatera).³ Pada umumnya perjanjian bagi hasil terjadi di antara pemilik tanah dan penggarap dikarenakan :

1. Pihak Pemilik Tanah

- a. Memiliki tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, atau
- b. Menolong dan memberi kesempatan kepada penggarap yang tidak memiliki tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tertentu.
- c. Keinginan memperoleh hasil tanpa bersusah payah (kuli kenceng, sikep, pribumi)

2. Bagi Penggarap/Pemaro

- a. Tidak memiliki tanah garapan hanya buruh tani (kuli gundul, numpang)
- b. Kelebihan waktu bekerja karena tanah garapan milik sendiri tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarga.
- c. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.⁴

Perjanjian bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis tapi hanya berdasarkan atas dasar saling percaya saja, dimana pemilik tanah mengizinkan penggarap mengelolah tanahnya dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam masyarakat biasanya terjadi dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut masyarakat di desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perjanjian bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis

³ *Ibid, hal.140*

⁴ *Hilman HadiKusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Cet,I, hal.151*

hal ini di karenakan minimnya pengetahuan anggota masyarakat di pedesaan serta tidak adanya sosialisasi mengenai Undang-undang nomor 2 tahun 1960 yang telah dibuat.

Adapun mengenai pengertian hukum adat ini terdapat banyak ahli yang mengemukakan bahwa kata “ adat ” ini berasal dari bahasa Arab yang berarti “ kebiasaan ” sehingga ada yang berpendapat bahwa hukum adat ini adalah merupakan hukum kebiasaan yang tidak tertulis.

Hukum adat sebagaimana yang di sampaikan oleh Ter Haar dalam pidato Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie in wetenschap,practijk en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “di terapkan begitu saja”, artinya tanpa ada keseluruhan peraturan yang kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Definisi Ter Haar tersebut kemudian dikenal dengan nama *Beslissingenleer*.⁵

Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya ini, maka di perlukan adanya aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut, yang mana bagi masyarakat pedesaan hukum adat

⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta, PT. PRENNADAMEDIA GROUP, 2014, Cet.I, hal. 4-5

lebih berperan dalam mengatur cara kehidupan. Baik yang menyangkut pelaksanaan perkawinan, pembagian harta warisan, sewa menyewa, perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya dan Undang-Undang tidak melarang menggunakan hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan.

Di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Kuala Betara, khususnya di Desa Sungai Dualap masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha Bagi Hasil untuk tanah-tanah pertanian. Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan Bagi Hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Dualap selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari perusahaan tanah tersebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, adapun luas tanah di Desa Sungai Dualap sebesar 230 hektar ada 172 pemilik kebun dan ada 60 penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah atau masyarakat Sungai Dualap mengenalnya dengan istilah (Bagi dua), ada juga pembagian hasil satu untuk penggarap dan dua untuk pemilik tanah (bagi tiga) pembagian hasil seperti ini biasanya terjadi ketika perjanjian dimulai saat setelah panen hingga panen berikutnya. sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang

berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum adat itu merupakan keseluruhan kelaziman atau kebiasaan yang telah berlaku dalam anggota masyarakat yang benar-benar telah menjadi suatu ikatan yang mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Setelah adanya kata sepakat maka selanjutnya yang perlu dibicarakan adalah mengenai hak dan kewajiban dari para pihak tersebut yakni pemilik kebun kelapa dan petani penggarap, Adapun hak dan kewajiban dari pemilik kebun kelapa secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Kewajibannya menyerahkan kebun kelapa pada petani penggarap untuk merawat dan melakukan pemanenan serta menyuruh petani penggarap untuk menjaga sebaik-baiknya kebun kelapa tersebut, agar hasil panen kebun kelapa terus banyak dan juga buahnya besar
- b. Kewajibannya menegur pihak penggarap yang kurang bersungguh-sungguh dalam bekerja menggarap dan merawat kebun kelapanya tersebut.
- c. Haknya menerima hasil panen dan menjualnya kepada toke kopra
- d. Haknya menerima bagian dari penjualan hasil panen kebun yang digarap oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan sebelumnya.⁷

Sedangkan hak dan kewajiban dari petani penggarap secara terperinci dapat dikatakan sebagai berikut :

⁶ Wawancara dengan Sukardi, Kepala Desa, tanggal 04 April 2019

⁷ Ibid.

- a. Kewajiban merawat dan melakukan penggarapan terhadap kebun kelapa yang telah di terimanya secara bersungguh-sungguh.
- b. Kewajiban membagi hasil panennya kepada pemilik kebun kelapa tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat sebelumnya.
- c. Haknya memperoleh bagian hasil panen dari kebun yang di garapnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan pemilik kebun.⁸

Namun dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan di Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2018-2019 tidak semua pemilik maupun petani penggarap yang memenuhi hak dan kewajiban yang telah dibicarakan sebelumnya, seperti pemilik kebun kelapa memutuskan secara sepihak perjanjian bagi hasil tanpa membicarakan atau menegur pihak petani penggarap.⁹

Dari pihak petani penggarap tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan dan merawat kebun kelapa yang telah di berikan sehingga paritnya dangkal atau rumput dan pepohonan liar tumbuh hinggakan menjadi semak. Ada kalanya petani penggarap dalam melakukan pemanenan mengambil kelapa yang belum tua hingga menyebabkan gagal panen berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan perjanjian bagi hasil di desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibahas dalam segi adat dalam sebuah skripsi dengan judul pilian adalah : **Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Kebun Kelapa diDesa Sungai dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dengan pemilik kebun kelapa di desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Mengapa hak dan kewajiban tidak terlaksana dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Agar dapat diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan di harapkan dalam penelitian, maka penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak di capai.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik kebun kelapa di desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan bentuk upaya penyelesaiannya

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian-penelitian lebih lanjut

- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat desa Suangai Dualap dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perjanjian bagi hasil yang di hadapi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekaburan ataupun salah penafsiran makna dari judul skripsi yang penulis kemukakan maka disini penulis akan memberikan definisi ataupun batasan-batasan terhadap kata-kata dari judul skripsi ini. Adapun definisi ataupun batasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰

2. Petani penggarap

Menurut Pasal 1 Poin e Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi hasil yakni “Petani, ialah orang yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian”

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh tim penyusun Kamus Pusat Bahasa bahwa : “Penggarap yaitu pekerja (orang yang menggarap tanah)”¹¹

3. Pemilik kebun

¹⁰ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 42-60.*

¹¹ *Ibid, hal. 336*

Menurut Pasal 1 Poin b Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi hasil yakni “Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah”

Berdasarkan penjelasan di atas yang terdapat dalam judul dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pelaksanaan Bagi Hasil antara Petani penggarap dengan Pemilik Kebun Kelapa di Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah suatu perbuatan yang merupakan kesepakatan antara Petani Penggarap dengan Pemilik Kebun Kelapa untuk melakukan pembagian hasil antara Petani Penggarap sebagai pihak yang memelihara Kebun Kelapa dengan pihak pemilik lahan yang menyediakan lahan di Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Sungai Dualap

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan adalah bentuk Deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan objek yang diteliti berkenaan dengan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Kebun Kelapa di Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perjanjian bagi hasil atau

peraturan desa yang terkait dalam hal ini peraturan adat desa, kemudian melihat bagaimana prakteknya yang terjadi di Desa Sungai Dulap Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Tata Cara pengambilan Sampel

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil yaitu antara petani penggarap dan pemilik kebun kelapa di Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan survei ada 30 pemilik kebun kelapa dan 30 petani penggarap dari populasi survei tersebut ada 20 orang dari masing-masing tidak bersedia memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan untuk penulisan, sehingga populasi menjadi 10 orang dan dari jumlah tersebut diambil 50%. Sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik Non Random Sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan representatif. Maka Sampel yang bersedia diwawancarai ada 5 orang penggarap dan ada 5 orang pemilik kebun kelapa di Desa Sungai dualap.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang di persiapkan, menyebarkan daftar kuisioner yang dianggap lebih mengetahui tentang perjanjian bagi hasil kebun kelapa di Desa Sungai Dualap.

b. Studi Pustaka

Yaitu dengan menggunakan literature-literatur yang ada guna mendukung pelaksanaan penelitian yang ada guna mendukung pelaksanaan penelitian dan data-data tertulis yang dapat dari lapangan.

6. Sumber Data

Sumber data di peroleh melalui :

a. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli sarjana, juga terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan sekripsi ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 sebagai data skunder, sehingga di peroleh satu kerangka dasar atau landasan teoritis guna mengetahui dan memahami persoalan yang dibahas.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk mendukung dari hasil penelitian kepustakaan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian di lapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat kongkrit yang merupakan data primer yang penting dalam mendidiskripsikan masalah.

7. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan di uraikan dalam bentuk kalimat pernyataan kemudian data tersebut menggunakan mode Induktif, yaitu dari data-data yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, sehingga dapat

dianalisis secara cermat berdasarkan teori-teori yang ada relevansinya dengan permasalahan dan kemudian di tarik beberapa kesimpulan serta saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini berdasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I Pendahuluan merupakan bab pembuka, disini penulis mengulaikan tentang latar belakang masalah pemilihan judul yang kemudian di ikuti dengan menyajikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, pada bab ini, disini penulis menguraikan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya, tinjauan umum tentang bagi hasil, yaitu latar belakang perjanjian bagi hasil, pengertian perjanjian bagi hasil, tata cara pelaksanaan bagi hasil.

BAB III Pembahasan dalam bab ketiga ini, penulis akan membahas yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil, kendala-kendala yang di hadapi serta upaya penyelesaian masalah perjanjian bagi hasil. Bab ini jawaban atas permasalahan yang timbul

BAB IV Dalam bab terakhir ini, penulis menyajikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada bab terdahulu dan yang di akhiri dengan beberapa saran dari penulis yang dianggap perlu.